

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Kota Gorontalo pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Pada Januari 2026 Kota Gorontalo berdasarkan data BPS Kota Gorontalo terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,7 persen dan tingkat deflasi (y-t-d) sebesar 0,19 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107.5 persen. Tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) Januari 2025 sebesar 0,19 persen dan tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) Januari 2025 sebesar 0,19 persen

Pada Februari 2025 Kota Gorontalo mengalami inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 4,67 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,45 pada Februari 2025 menjadi 108,28 pada Februari 2026. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,73 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 0,54 persen.

Pada bulan Maret 2026 Kota Gorontalo mengalami inflasi y-on-y sebesar 2,75 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,75 pada Maret 2025 menjadi 108,66 pada Maret 2026. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,35 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 0,89 persen

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Kota Gorontalo pada triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan cuaca mempengaruhi hasil tangkapan nelayan sehingga ikan dan produk perikanan mengalami kenaikan.
2. Tingginya permintaan bahan pokok seperti beras,minyak goreng dan daging pada bulan maret disebabkan tinggi permintaan masyarakat selama bulan ramadhan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk mengendalikan inflasi akibat berbagai faktor diatas dan terus menjaga pasokan bagi masyarakat serta dengan harga terjangkau, maka dilaksanakan berbagai kebijakan pengendalian inflasi berdasarkan strategi 4 K di Kota Gorontalo pada Triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) (**Ketersediaan Pasokan, Kelancaran distribusi**)
2. Pelaksanaan sidak ke distributor agar tidak menahan barang dipimpin Wali Kota Gorontalo Bersama muspida (satgas pangan) (**Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif**)
3. Pelaksanaan Gelar Pangan Murah (GPM) Non subsidi dan Pelaksanaan Pasar Murah bersubsidi (**Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga**)
4. Pelaksanaan penyusunan Pogrnosa pangan (**Ketersediaan Pasokan, Kelancaran distbusi,**)
5. Pelaksanan bantuan Bus Gratis bagi Masyarakat yang berada di zona rawan pangan

(Kelancaran Distribusi, Komunikasi efektif)

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun evaluasi terhadap kebijakan pengendalian inflasi di Kota Gorontalo pada triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan berjalan dengan cukup baik dan dapat menahan laju peningkatan harga-harga komoditas tersebut di atas sehingga tidak menyebabkan inflasi rendah/deflasi, kebijakan pasar murah bersubsidi sebanyak 4.500 paket yang disediakan oleh Pemerintah bekerjasama dengan Pihak Ke 3 sebagai penyedia.
2. Pembentukan Satgas Pangan dan melakukan sidak ke distributor serta operasi pasar menjadi signal bagi masyarakat bahwa pemerintah melakukan tugasnya untuk memastikan tidak ada penjual/distributor yang melakukan penimbunan. Hal ini berdampak positif dimana masyarakat tidak melakukan panic buying untuk melakukan penyimpanan bahan pangan di rumah.
3. Pelaksanaan pemantauan ketersediaan gas elpiji menjelang ramadhan dipimpin Wali Kota Gorontalo dan pada saat ramadhan dipimpin pelaksana harian TPID Kota Gorontalo.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan *continuously*, TPID Kota Gorontalo ke depannya akan melakukan berbagai kebijakan, antara lain:

A. Ketersediaan Pasokan

1. Meningkatkan frekuensi kegiatan pengawasan dan monitoring ketersediaan stok dan harga barang.
2. Penyusunan Prognosa kebutuhan pangan.

B. Kelancaran Distribusi

1. Melakukan Operasi Pasar Murah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali di 9 (Sembilan) kecamatan.
2. Melakukan bantuan bus gratis bagi masyarakat yang berada di zona rawan pangan.

C. Keterjangkauan Harga

1. Melakukan Pasar Murah bersubsidi menjelang bulan suci ramadhan dan menjelang Idul Fitri (HBKN).

D. Komunikasi Efektif

1. Koordinasi antar Tim Pengendali Inflasi Daerah, perlu di tingkatkan tidak hanya dalam bentuk pertemuan formal namun lebih sering dilakukan pertemuan pertemuan informal.
2. Mencermati perkembangan harga komoditas volatile food demi menghindari kenaikan harga yang signifikan.